

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Kota Semarang yang mempunyai sejarah panjang, sudah dikenal sebagai kota multietnis. Daya tarik Semarang sebagai kota pelabuhan, kota dagang dan kota pemerintahan, menarik para migran, baik migran dari kota-kota yang ada di wilayah Jawa, migran dari kota-kota di pulau-pulau di luar Jawa, dan migran dari negara-negara lain seperti Arab, Cina, India, dan bangsa Barat. Para migran ini datang dan bermukim di Semarang dengan berbagai tujuan, yaitu antara lain karena di negaranya terjadi bencana kelaparan, ingin mencari penghidupan yang lebih baik, politis dan sebagainya. Pada awalnya para migran ini menetap secara berkelompok berdasarkan etnis dengan tujuan mencari kenyamanan dan keamanan. Dengan tinggal berkelompok, mereka dapat menjalankan aktivitas sosial, keagamaan dan budaya secara lebih leluasa. Pada perkembangannya kemudian, telah terjadi asimilasi alamiah yang mulai menghapuskan batas etnisitas para migran ini, sehingga kita dapat melihat di dalam komunitas Arab juga terdapat pemukiman Cina, demikian pula sebaliknya.¹

Pada saat pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Indonesia, secara umum terjadi segregasi etnis yaitu dengan menetapkan pembagian masyarakat di daerah jajahannya dalam tiga golongan yaitu golongan masyarakat Eropa,

¹Titiek Suliyati, "Konsep Feng Shui Pada Tata Ruang Kawasan Pecinan Semarang Sebagai Respon Terhadap Aktivitas Masyarakat" (Tesis Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2007), hlm. 2.

golongan Timur Asing dan golongan Pribumi. Pemukiman berdasarkan etnis secara lebih tegas ditetapkan dengan tujuan politis, yaitu antara lain dengan diberlakukannya *officieren* pada tahun 1672 (mengangkat pejabat/kapiten dari kelompok-kelompok etnis untuk mengatur masyarakat dan menjadi perantara bila ada masalah-masalah yang terjadi dalam kelompok etnisnya dengan pemerintah kolonial), *wijkenstelsel*² pada tahun 1841-1915 (penentuan pemukiman untuk kelompok-kelompok etnis), *passenstelsel*³ pada tahun 1863 (*pass*/surat jalan).⁴

Pengakuan pemerintahan Indonesia terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan dijalinnya hubungan diplomatik antara RRT dan RI pada tahun 1950 membuat orang keturunan Tionghoa yang tidak pro dengan komunis Tiongkok (rata-rata pro-*Kuomintang*⁵) dan kelompok anti-Komunis Indonesia merasa takut bahwa warga keturunan Tionghoa akan menjadi agen dari Komunis Tiongkok.

²Peraturan ini melarang orang Tionghoa untuk tinggal di tengah kota dan mengharuskan orang Tionghoa membangun satu wilayah khusus berupa Pecinan untuk tempat mereka tinggal. Lihat: Ester Indahyani Jusuf, 'Jalan Panjang Menuju Rasialisme', dalam *Jurnal Dinamika Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2002, (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia), hlm. 49.

³*Passenstelsel* yaitu keharusan bagi setiap orang Tionghoa untuk mempunyai surat jalan (*pass*) khusus apabila hendak bepergian keluar distrik tempat dia tinggal. Dengan adanya surat jalan ini, VOC dapat mengawasi aktivitas Tionghoa mencegah percampuran budaya (untuk memelihara perbedaan rasial), dan mencegah interaksi ekonomi-politik-sosial mereka dengan penduduk lainnya. Lihat: *Ibid.*,

⁴Suliyati, *op. cit.*, hlm. 4.

⁵*Kuomintang* atau disebut juga Partai Nasionalis Tiongkok, yaitu partai politik tertua dalam sejarah modern Tiongkok. Partai ini didirikan oleh Sun Yat Sen dengan tujuan revolusi melawan Kekaisaran Qing dan mendirikan Republik Tiongkok demi adanya pembaruan di Tiongkok. Lihat: Wikipedia, "Kuomintang", (*online*), (<http://id.wikipedia.org/wiki/kuomintang>, diunduh pada 16 Mei 2014).

Pada bulan Agustus 1951, ada tindakan yang dikenal dengan Razia Sukiman⁶, yang merupakan tindakan menangkap para tokoh PKI dan orang keturunan yang berkiblat ke RRT.⁷

Memasuki periode 1960-an, sikap pemerintah Soekarno terhadap warga keturunan Tionghoa sangat berkaitan dengan semakin dekatnya pemerintahannya dengan negara Tiongkok.⁸ Keterlibatan politik keturunan Tionghoa menjadi masif sejak awal 1960-an, yaitu dengan semakin besarnya organisasi Baperki. Ada fakta bahwa di kalangan kaum keturunan Tionghoa ternyata secara politik terbagi menjadi dua kelompok, kelompok Kiri yang dekat dengan PKI dan Soekarno serta kelompok yang dekat dengan Angkatan Darat, musuh-musuh PKI dan Soekarno. Kelompok yang dekat dengan Soekarno adalah warga keturunan Tionghoa yang tergabung dalam Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), yang waktu itu berkiblat pada RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kubu satunya adalah LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa). Baperki secara jelas sangat dekat dengan kelompok komunis, sedangkan LPKB sangat dekat dengan kelompok anti-komunis dan Angkatan Darat.⁹

Kerusuhan anti-Tionghoa yang meletus pada tahun 1963, setelah diselenggarakan kongres Baperki tampaknya mencerminkan perbedaan pendapat

⁶Razia Sukiman ini bertujuan untuk menggagalkan konsolidasi PKI yang dilaksanakan pada masa kabinet Sukiman, yaitu pada bulan Agustus 1951.

⁷Nurani Soyomukti, *Soekarno & Cina* (Yogyakarta: Garasi, 2012), hlm. 199.

⁸Soyomukti, *op. cit.*, hlm. 202.

⁹Soyomukti, *op. cit.*, hlm. 183.

dan pertarungan antara kedua kubu komunitas Tionghoa tersebut. Kongres Baperki yang dihadiri Presiden Soekarno itu memang mendekatkan komunitas Tionghoa Kiri pada garis politik yang ditempuh Presiden RI pertama yang semakin anti-Barat dan dekat dengan Tiongkok.¹⁰

Huru-hara di sekitar masalah keturunan Tionghoa menjelang pergantian pemerintahan Soekarno ke tangan Soeharto berlangsung terus-menerus sejak bulan Oktober 1965.¹¹ Berakhirnya pemerintahan Soekarno telah mengakibatkan keturunan Tionghoa yang garis politiknya Kiri dengan Baperki mendapatkan perlakuan sama dengan apa yang dilakukan pada PKI (Partai Komunis Indonesia), yaitu pembantaian besar-besaran. Kebencian Angkatan Darat (AD) dan kalangan sipil pada keturunan Tionghoa di perbesar oleh fakta bahwa mereka komunis Tiongkok yang telah mendukung sepenuhnya PKI untuk menjadikan Indonesia negara komunis, suatu yang paling ditakuti Angkatan Darat dan para elite pribumi yang sejak awal sangat membenci komunis.¹²

Sejak terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang gagal dan menjadi awal bagi penghancuran PKI, tindakan Angkatan Darat di bawah Soeharto yang membantai “pemberontak” PKI juga tidak ketinggalan mengintimidasi kaum keturunan Tionghoa karena identik dengan Tionghoa Komunis. Dalam tindakan menghancurkan PKI dan membantai, membunuh, memenjarakan, dan menyiksa para aktivis dan simpatisannya, warga keturunan

¹⁰*Ibid.*,

¹¹*Ibid.*,

¹²Soyomukti, *op. cit.*, hlm.184.

Tionghoa juga menjadi sasaran sikap kemarahan yang didasari prasangka bahwa keturunan Tionghoa identik dengan komunis. Sejumlah orang keturunan Tionghoa dibunuh, disiksa, dan dipenjarakan. Aset-aset dan lembaga-lembaganya juga ambil alih oleh Angkatan Darat pimpinan Soeharto.¹³

Pemerintah Orde Baru waktu itu meragukan nasionalisme keturunan Tionghoa. Mereka dicurigai secara politis masih berorientasi ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) meskipun sudah turun-temurun tinggal di Nusantara. RRT dituding telah ikut membesarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan punya andil dalam gerakan pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965. Itu pula yang menjadi salah satu alasan pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan RRT pada tahun 1967.

Pada awal Orde Baru (1966-1998), Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi terhadap kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia. Tujuannya adalah lewat asimilasi, semua komunitas keturunan Tionghoa sebagai komunitas yang terpisah akan lenyap. Kebijakan pada rezim Soeharto itu dilakukan melalui Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Adapun isi instruksi tersebut adalah “tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata cara ibadat Tionghoa yang memiliki aspek kultural pada negeri leluhur, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan; perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Tionghoa dilakukan

¹³Soyomukti, *op. cit.*, hlm. 203.

secara tidak mencolok di depan umum, tetapi dilakukan dalam lingkungan keluarga”.¹⁴

Pada masa Orde Baru, kehidupan masyarakat keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang mengalami masa-masa kehidupan yang tidak mengenakan. Keluarnya peraturan dan undang-undang yang diskriminatif itu membuat kelompok keturunan Tionghoa mempunyai ruang kebebasan yang sangat sempit. Segala yang berhubungan dengan upacara ritual keagamaan, adat istiadat, kebudayaan Tionghoa seperti pertunjukan barongsai, arak-arakan *toapekong*, wayang potehi, dan perayaan Imlek dirayakan dalam lingkungan interen atau keluarga saja.¹⁵ Sekolah-sekolah Tionghoa yang mengajarkan bahasa dan kebudayaan Tionghoa pun ditutup. Kehidupan mereka yang semestinya ditandai oleh pesta-pesta dari tradisi mereka, tidak ada lagi. Dampak dari kebijakan Orde Baru ini selama 30 tahun masyarakat keturunan Tionghoa Indonesia tidak dapat menikmati kebudayaan mereka sendiri.

Sikap diskriminatif yang mereka terima baik secara politik maupun sosial, membuat sebagian warga keturunan Tionghoa merasa perlu menyamarkan identitas etnik dan kebudayaan mereka hanya agar bisa tetap *survive* di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Antara lain dengan mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia. Untuk tujuan sama, sebagian secara resmi juga

¹⁴Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda “66”, *Sekitar Pembauran Bangsa di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda “66”, 1985), hlm. 342-343.

¹⁵H. Junus Jahja, ‘Masalah Orang Tionghoa di Indonesia’, dalam Alfian Hamzah, editor, *Kapok Jadi Nonpri: Warga Tionghoa Mencari Keadilan* (Bandung: Zaman Wacana, 1998), hlm. 87.

meninggalkan ajaran Khonghucu warisan orangtua dan memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah.¹⁶

Situasi berubah setelah runtuhnya rezim Soeharto. Begitu Soeharto lengser dan Orde Baru runtuh pada 21 Mei 1998, orang-orang Tionghoa seakan-akan terlepas dari sebuah rantai belenggu besar. Orang-orang keturunan Tionghoa mengalami kebebasan dan kemerdekaan, yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Begitu pula orang-orang keturunan Tionghoa, yang selama 30 tahun itu mengalami pembatasan dan pembelengguan atas hak-hak mereka. Tahun baru Imlek menjadi hari libur fakultatif (Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2001) dan dua tahun kemudian Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Kesenian seperti Barongsai dan liong bangkit lagi dan menjadi atraksi yang memikat di seluruh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dalam tesis ini akan dibahas mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 dan dampaknya terhadap kehidupan budaya & ekonomi keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang, 1967-2002. Untuk mengkaji permasalahan pokok tersebut maka beberapa pertanyaan harus dijawab, yaitu apa latar belakang dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967?, bagaimana pelaksanaan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967?, bagaimana dampak pelaksanaan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 terhadap kehidupan budaya dan ekonomi keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang?

¹⁶Leovandita Eka Jati, 'Undang-undang Anti Diskriminasi Tionghoa di Indonesia pada Tahun 1998-2008', dalam *Avatara, e-Journal Sejarah*, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm. 120.

B. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian perlu dilakukan untuk menghindarkan peneliti dari kesulitan-kesulitan akibat pokok persoalan, objek maupun cakupan wilayah penelitian yang terlampau luas.¹⁷ Pembahasan dalam tesis ini dibatasi berdasarkan tiga ruang lingkup yaitu lingkup temporal, spasial, dan keilmuan.

Dalam kaitan dengan lingkup temporal, dalam tesis ini dibahas tentang Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 dan dampaknya terhadap kehidupan budaya dan ekonomi keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang, 1967-2002. Tahun 1967 dijadikan titik awal pembahasan karena pada tahun itu mulai dikeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat-istiadat Tionghoa. Dengan adanya instruksi itu, berbagai hal yang berkaitan dengan agama, adat istiadat dan kebudayaan Tionghoa tidak boleh diekspresikan secara terbuka di depan umum melainkan harus dilakukan dalam lingkungan intern atau keluarga.

Tahun 2002 dipilih sebagai batas akhir pembahasan karena pada tahun itu, Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan Imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini merupakan keputusan yang sangat penting dan pemulihan lebih lanjut atas hak-hak kultural keturunan Tionghoa. Imlek sebagai bagian dari kebudayaan Tionghoa, perayaannya semakin meriah ditambah dengan tampilnya kesenian-kesenian Tionghoa seperti barongsai, liong dan wayang potehi.

¹⁷Melly G. Tan, 'Masalah Perencanaan Penelitian', dalam Koentjaraningrat, (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 17-18.

Dengan demikian penentuan lingkup temporal antara tahun 1967-2002 dimaksudkan bahwa tesis ini lebih berfokus pada pelaksanaan Instruksi Presiden No.14 Tahun 1967 dan dampaknya terhadap kehidupan budaya & ekonomi keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang, sebagai akibat dari kondisi politik di Indonesia yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 sampai dengan pencabutannya pada tanggal 17 Januari 2000, yang mana kebijakan tersebut tidak memberikan keleluasan bagi keturunan Tionghoa untuk mengekspresikan kebudayaan mereka.

Lingkup spasial tesis ini adalah kawasan Pecinan di kota Semarang karena Pecinan merupakan pusat hunian orang-orang keturunan Tionghoa. Selain itu, masyarakat keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang masih melaksanakan kegiatan ritual tradisi dari negeri leluhurnya dan kawasan Pecinan Semarang merupakan kawasan bisnis yang ramai. Kawasan Pecinan masuk pada wilayah kecamatan Semarang Tengah. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Jalan Agus Salim, Gang Lombok dan Jalan Petudungan; sebelah Timur berbatasan dengan Kali Semarang; sebelah selatan berbatasan dengan Kali Semarang, Jalan Petudungan dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Pedamaran dan Jalan Beteng.¹⁸ Penduduk Tionghoa yang tinggal di kawasan Pecinan kecamatan Semarang Tengah berjumlah 5.793 jiwa.¹⁹

¹⁸Suliyati, *op. cit.*, hlm. 15.

Dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, kajian dalam tesis ini dilihat dari lingkup keilmuan dapat dikategorikan sebagai sejarah sosial. Sejarah sosial membahas bagaimana hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat, perubahan sosial, konflik sosial dan perubahan kultural. Topik-topik yang dikaji dalam sejarah sosial meliputi antara lain kelompok-kelompok sosial dan etnik, perkembangan golongan-golongan sosial, gaya hidup, gerakan sosial, dan etika serta etika pergaulan.²⁰ Dapat dilihat bagaimana kondisi keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang pada saat Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Instruksi Presiden yang mana isinya sangat membatasi eksistensi agama, kepercayaan dan adat-istiadat keturunan Tionghoa. Perubahan besar terjadi setelah dicabutnya Instruksi Pemerintah tersebut. Keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang mulai dapat kembali mengekspresikan kebudayaannya secara terbuka.

¹⁹Data tersebut adalah data jumlah penduduk pada tahun 2002. 95% dari mereka adalah WNI. 49% penduduknya berumur 40 tahun, jauh di atas rata-rata demografi Indonesia. Alasannya karena banyak keluarga muda lebih suka tinggal di perumahan modern di pinggir kota. 56% penghuni Pecinan adalah wanita, karena kaum wanita memiliki umur yang lebih panjang daripada kaum pria. 43% dari jumlah penduduk Pecinan hidup sejak lahir di Pecinan Semarang. Paling banyak penduduk (37%) menganut agama Buddha, penganut Kristen/Katholik (33%), penduduk yang beragama Islam adalah minoritas (29%). Lebih jelas lihat: Markus Zahnd, *Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual: Kajian Tentang Kawasan Tradisional di Kota Semarang dan Yogyakarta: Suatu Potensi Perancangan Kota yang Efektif* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 175.

²⁰Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 159 dan 195.

C. Tinjauan Pustaka

Beberapa pustaka perlu ditinjau karena memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam tesis ini. Pertama adalah artikel dari jurnal yang berjudul “Interaksi Sosial Antar Etnis di Pasar Gang Baru Pecinan Semarang dalam Perspektif Multikultural”, ditulis oleh Deka Setiawan.²¹ Artikel ini memberikan gambaran mengenai interaksi sosial antar etnis dalam perspektif multikultural di pasar Gang Baru Semarang di era Reformasi. Artikel ini berusaha menggali interaksi sosial antar etnis, mengkaji dan mengorganisasikan pemahaman interaksi sosial antar etnis masyarakat Pecinan Semarang, serta menggali informasi tentang bentuk implikasi pemahaman wawasan multikultural terhadap interaksi sosial antar etnis.

Proses interaksi sosial di Pasar Gang Baru Pecinan Semarang dipengaruhi oleh faktor etnis, agama, dan tempat tinggal. Pranata-panata tradisional cukup fungsional dalam membangun jaringan integrasi antar komunitas yang heterogen itu. Realitas pemahaman multikultural telah terkonsepkan baik dengan adanya sifat saling memahami, menjaga kebersamaan dalam satu wilayah, dan keterlibatan dalam beberapa kegiatan kerja bakti, arisan, kenduri, acara keagamaan serta pembauran hidup secara turun-temurun. Secara konseptual implementasi pemahaman multikultural dalam kerukunan antar umat beragama yakni menolak perbedaan, mampu hidup saling menghargai menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, tradisi, adat maupun budaya

²¹Deka Setiawan, ‘Interaksi Sosial Antar Etnis di Pasar Gang Baru Pecinan Semarang dalam Perspektif Multikultural’, dalam *Journal of Educational Social Studies* (Prodi Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2012).

adalah berkembang kerja sama sosial dan tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan dan toleransi agama. Artikel ini sangat relevan bagi penelitian karena memberikan penjelasan mengenai interaksi sosial masyarakat keturunan Tionghoa di salah satu gang di Pecinan Semarang. Kelemahan artikel ini yaitu hanya fokus membahas pada satu tempat di Pecinan Semarang saja yaitu Pasar Gang Baru. Artikel ini tidak membahas interaksi sosial di gang-gang lain di Pecinan Semarang.

Kedua, tesis yang berjudul “Aktivitas Politik Golongan Tionghoa di Semarang Tahun 1917-1942”, ditulis oleh Rika Wijayanti.²² Tesis ini membahas mengenai aktivitas politik golongan Tionghoa, perkembangan aktivitas politik golongan Tionghoa dan organisasi-organisasi yang menjadi wadah perjuangan politik golongan Tionghoa di Semarang tahun 1917-1942. Semangat untuk lepas dari belenggu penjajahan menjadi faktor kuat melawan penindasan yang sudah bertahun-tahun mereka alami, dan rasa kecintaan pada negeri leluhur yang sangat kuat juga merupakan faktor pendukung golongan Tionghoa di Semarang untuk ikut ambil bagian dalam politik. Aktivitas politik golongan Tionghoa di Semarang tahun 1917-1942 mengalami perkembangan, yang awalnya bersikap apatis, namun sejalan dengan perubahan kondisi politik di Hindia Belanda akhirnya golongan Tionghoa ini mencoba untuk ikut bersikap secara aktif melalui keikutsertaan mereka dalam *Volksraad* maupun pendirian organisasi-organisasi sebagai wadah perjuangan politik mereka.

²²Rika Wijayanti, “Aktivitas Politik Golongan Tionghoa di Semarang Tahun 1917-1942” (Tesis Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012).

Tesis ini berguna bagi penelitian terutama untuk memberi gambaran tentang aktivitas politik keturunan Tionghoa di Semarang pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Tesis ini relevan dengan penelitian karena terdapat satu sub bab yang membahas tentang kondisi sosial ekonomi orang-orang Tionghoa di Semarang pada periode 1900-an. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa kota Semarang terkenal dengan adanya pengusaha-pengusaha Tionghoa peranakan. Salah satunya *Oei Tiong Ham Concern* (OTHC) yang merupakan perusahaan terbesar di Hindia Belanda. Perdagangan yang dilakukan oleh Oei Tiong Ham yang dikelola oleh orang-orang Tionghoa mengalami kemajuan yang lebih pesat. Hal ini dipengaruhi oleh sifat-sifat dasar orang-orang keturunan Tionghoa yang lebih mementingkan bidang perdagangan untuk menunjang perekonomian mereka dibandingkan perhatian pada bidang lain.

Perkembangan yang sangat pesat dalam perdagangan membawa banyak kemajuan atau perkembangan bagi kota Semarang, salah satunya pada bentuk tata kota yang tidak teratur misalnya dekat dengan kota dagang orang Eropa, terdapat tempat tinggal dan lokasi kerja orang-orang Tionghoa. Pengaruh ini terlihat dengan berubahnya fungsi kampung Pecinan dari tempat hunian menjadi tempat untuk berdagang pula, usaha tersebut biasanya terdiri dari sebuah kantor dagang atau toko maupun gudang, yang menjadi satu dengan tempat tinggal pemilik dan keluarganya.

Kelemahan tesis ini yaitu tidak membahas mengenai aktivitas budaya orang-orang keturunan Tionghoa di Semarang. Tesis ini sebagian besar hanya membahas tentang aktivitas politik orang-orang keturunan Tionghoa di Semarang

dan hanya sampai periode sebelum kemerdekaan. Tesis ini tidak membahas aktivitas budaya dan ekonomi orang-orang keturunan Tionghoa secara lengkap.

Ketiga, laporan penelitian yang berjudul “Model Penataan Kawasan Pecinan pada Kota Pantai yang Berbasis Budaya dan Bersinergi dengan Aktivitas Ekonomi Masyarakat” ditulis oleh Titiek Suliyati, dkk.²³ Laporan penelitian ini sangat relevan dengan tesis karena membahas secara detail mengenai aktivitas ekonomi dan budaya masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang, yang akhirnya dapat digunakan sebagai salah satu referensi penting dalam penulisan tesis ini.

Laporan penelitian ini memberikan gambaran bahwa kawasan Pecinan Semarang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai kawasan konservasi budaya yang menjadi salah satu identitas Kota Semarang yang bersinergi dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Potensi Kawasan Pecinan tersebut bisa dilihat dari aspek historis, potensi geografis dan ekologis, potensi sosial budaya, potensi ekonomi dan potensi politik.

Karakter kawasan Pecinan sebagai kawasan ekonomi atau bisnis tidak mengalami perubahan, bahkan saat ini karakter sebagai kawasan ekonomi semakin tegas karena aktivitas masyarakatnya dominan di bidang ekonomi. Walaupun demikian ciri-ciri budaya dan tradisi Tionghoa tidak hilang sama sekali. Pengembangan potensi budaya Tionghoa sebagai basis ekonomi diharapkan dapat lebih meningkatkan perekonomian masyarakat secara lebih luas dan merata.

²³Titiek Suliyati, *et al*, “Model Penataan Kawasan Pecinan pada Kota Pantai yang Berbasis Budaya dan Bersinergi dengan Aktivitas Ekonomi Masyarakat” (Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2009).

Kawasan Pecinan Semarang memiliki keunikan dalam budaya yang ditampilkan dalam bentuk fisik struktur tata ruang jalan dan bangunan-bangunan kelenteng serta aktivitas sosial budaya yang masih kental dengan tradisi dari negeri Tiongkok. Hal ini menjadi daya tarik yang dapat dikemas sebagai obyek wisata di kawasan Pecinan.

Keempat adalah tesis berjudul “Sekolah *Khong Kauw* (SKK) Semarang 1950-1979: Pembentukan Identitas, Pendidikan Karakter, dan Strategi Adaptasi Masyarakat Tionghoa” oleh Etik Mahareni D. P.²⁴ Tesis ini membahas tentang sekolah gratis “Khong Kauw” bagi Tionghoa miskin yang berusaha mengatasi persoalan identitas Tionghoa karena diskriminasi. Dinamika SKK Semarang dapat dipandang sebagai sebuah strategi adaptasi minoritas Tionghoa di Indonesia. Pembentukan identitas yang asimilatif adalah perwujudan dari usaha untuk bertahan dan keluar dari kungkungan diskriminasi ras dan budaya Tionghoa. Kajian ini berguna untuk memahami proses integrasi sosial budaya masyarakat Indonesia yang majemuk dalam rangka terciptanya toleransi dan harmoni sosial. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pendekatan budaya berupa pendidikan karakter didalam komunitas minoritas guna membangun Indonesia yang lebih baik.

Tesis ini juga memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat dianggap sebagai usaha minoritas Tionghoa untuk meleburkan diri dalam kebudayaan mayoritas (kebudayaan dominan). Hal ini mengindikasikan adanya usaha

²⁴ Etik Mahareni D. P., “Sekolah *Khong Kauw* (SKK) Semarang 1950-1979: Pembentukan Identitas, Pendidikan Karakter, dan Strategi Adaptasi Masyarakat Tionghoa” (Tesis Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012).

keturunan Tionghoa Semarang untuk dapat diterima dan eksis sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Pendidikan karakter dapat dianggap sebagai sebuah strategi adaptasi keturunan Tionghoa dalam menghadapi diskriminasi dengan cara meleburkan sebagian atau semua dengan kebudayaan mayoritas. Dalam konteks negara dan bangsa, kebudayaan mayoritas yang dimaksud adalah kebudayaan nasional Indonesia. Dengan derajat asimilasi kultural yang tidak sama, berakibat pada pembentukan identitas yang tidak seragam pula. Identitas masyarakat keturunan Tionghoa di Semarang merupakan proses negosiasi budaya yang terus berjalan.

Relevansi tesis ini dengan penelitian terutama pada sub bab yang membahas tentang kehidupan ekonomi, sosial, dan politik keturunan Tionghoa di Semarang dan gambaran asimilasi keturunan Tionghoa di Semarang. Terjadinya asimilasi budaya orang-orang Tionghoa di Semarang periode 1950-an ditandai dengan munculnya perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Terjadinya asimilasi budaya Tionghoa terlihat dalam persekolahan, praktik kepercayaan, perkawinan, perdagangan, dan kesenian. Peningkatan perkawinan campur juga terjadi antara orang Tionghoa dengan orang Indonesia. Kuatnya peranan Tionghoa sebagai pedagang perantara/eceran mengharuskan mereka berhubungan dengan orang-orang pribumi. Dalam relasi ini, sebagian besar orang Tionghoa memiliki posisi ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang Indonesia.

Kelima, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penggantian Nama Tionghoa dan Pengaruhnya Terhadap Usaha Mencapai Kesetaraan Sosial di Kalangan WNI Keturunan Tionghoa di Kelurahan Jagalan Semarang” oleh Mohammad Garaudy

Guntur Pramana.²⁵ Skripsi ini membahas tentang peranan penggunaan nama Indonesia sebagai campur tangan pemerintah dalam proses pembauran pada komunitas keturunan Tionghoa khususnya dampak yang terjadi di Jagalan Semarang. Awal mula penggunaan nama Indonesia di kalangan komunitas Tionghoa terjadi pada tahun 1967. Pemerintah pada tahun tersebut mengeluarkan Keppres yang berisi anjuran bagi orang Tionghoa untuk menanggalkan nama Tionghoa dan mulai menggunakan nama-nama yang lazim di Indonesia.

Keppres anjuran ganti nama bagi orang Tionghoa oleh pemerintah dimaksudkan untuk mempercepat proses pembauran orang Tionghoa ke dalam tubuh masyarakat Tionghoa. Namun demikian, dampak positif dari penggunaan Nama Indonesia tidak secara jelas terlihat dalam masyarakat Kelurahan Jagalan Semarang. Pembauran yang berjalan dalam interaksi orang Tionghoa dan Jawa di Jagalan yaitu penggunaan nama Indonesia. Penggantian nama termasuk dalam upaya pembauran yang dipaksakan. Pembauran alami telah berhasil mengadaptasikan orang Tionghoa dengan nilai-nilai orang pribumi daripada pembauran paksaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Skripsi ini sebagai salah satu acuan tesis diharapkan mampu memberikan informasi maupun data untuk kelengkapannya. Kelemahan skripsi ini yaitu hanya menjelaskan pelaksanaan penggantian nama pada salah satu tempat di Pecinan saja yaitu Jagalan. Daerah lain di Pecinan Semarang tidak dibahas dalam skripsi ini. Akan tetapi gambaran mengenai pelaksanaan ganti nama Tionghoa di

²⁵Mohammad Garaudy Guntur Pramana, "Pelaksanaan Penggantian Nama Tionghoa dan Pengaruhnya Terhadap Usaha Mencapai Kesetaraan Sosial di Kalangan WNI Keturunan Tionghoa di Kelurahan Jagalan Semarang" (Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2011).

Kelurahan Jagalan Semarang yang meliputi proses, pemilihan nama-nama yang digunakan untuk ganti nama dan pengaruhnya dikalangan keturunan Tionghoa dapat diketahui dari skripsi ini.

D. Kerangka Teoritis dan Pendekatan

Sebagaimana yang telah disinggung di depan, tesis ini mengkaji perubahan budaya dan ekonomi keturunan Tionghoa di Semarang sebagai akibat kondisi politik di Indonesia yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 sampai dengan pencabutannya pada tanggal 17 Januari 2000. Oleh karena itu, tesis ini menggunakan pendekatan antropologi politik yang memusatkan perhatiannya pada deskripsi dan analisis tentang sistem politik mulai dari struktur, proses dan perwakilan yang terdapat dalam masyarakat.

Melalui pendekatan antropologi politik, dapat dianalisis tindakan pemerintah Orde Baru yang mencoba menciptakan kestabilan politik dengan tanpa memperhatikan hak-hak sosial dan politik masyarakat sehingga akibatnya muncul tindakan yang dirasakan diskriminatif terhadap keturunan Tionghoa di Indonesia. Penguasa Orde Baru mencoba meleburkan keturunan Tionghoa ke dalam kultur masyarakat lokal di Indonesia. Melalui jalan ini, penguasa Orde Baru berharap dengan peleburan itu masyarakat keturunan Tionghoa akan terlepas dari negeri leluhurnya sehingga menjadi masyarakat Indonesia “asli”.

Berkaitan dengan itu, menarik untuk memperkenalkan konsep asimilasi, yaitu proses perubahan budaya antara dua masyarakat atau lebih secara perlahan dan lama sekali. Perubahan tersebut dapat terjadi pada satu pihak maupun pada kedua belah pihak. Berapa banyak yang ditiru atau diambil dari kebudayaan pihak

lain di dalam kebudayaan sendiri masing-masing tersebut tidaklah sama dan tidak diketahui unsur yang mana yang berperan.²⁶

Menurut Koentjaraningrat, proses asimilasi akan timbul apabila ada tiga unsur, yaitu (a) adanya golongan manusia yang berasal dari latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, (b) saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang cukup lama, dan (c) kebudayaan golongan masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya suatu proses asimilasi terjadi antara suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam peristiwa seperti itu biasanya golongan minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas, sehingga sifat-sifat khas dari kebudayaannya lambat-laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan mayoritas.²⁷ Akan tetapi, pergaulan intensif saja belum tentu mengakibatkan terjadinya suatu proses asimilasi, tanpa adanya toleransi dan simpati antara kedua golongan. Sebaliknya, kurangnya toleransi dan simpati terhadap suatu kebudayaan lain umumnya disebabkan karena berbagai kendala, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan pihak yang dihadapi, kekhawatiran akan kekuatan yang dimiliki kebudayaan tersebut, dan perasaan bahwa kebudayaannya sendiri lebih unggul dari kebudayaan pihak yang dihadapi.²⁸

²⁶Nurhajarini, *op. cit.*, hlm. 707.

²⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 160.

²⁸*Ibid.*,

Lebih jelas Burhanuddin menjelaskan mengenai asimilasi yaitu:

“... asimilasi itu proses sosial yang telah lanjut yang ditandai oleh makin kurangnya perbedaan antara individu dan antarkelompok dan makin eratnya persatuan aksi, sikap dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama”.²⁹

Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antarindividu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-batas antarkelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.³⁰

Pada masa awal Orde Baru dari sisi sosial politik, kehidupan keturunan Tionghoa makin memburuk³¹ karena adanya anggapan dan tuduhan dari masyarakat serta pemerintah bahwa keturunan Tionghoa terlibat dalam peristiwa Gestapu yang dilakukan oleh PKI.³² Banyak dari keturunan Tionghoa yang

²⁹Nurhajarini, *op. cit.*, hlm. 696, 707. Lebih jelas lihat: Burhanuddin, dkk, *Stereotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial* (Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988), hlm. 225.

³⁰*Ibid.*,

³¹Dari sisi ekonomi, orang-orang keturunan Tionghoa justru mendapat berbagai keistimewaan sehingga banyak dari mereka yang menjadi konglomerat dengan menguasai usaha yang mempunyai nilai jutaan dollar. Lebih jelas lihat: Richard Robinson, *Indonesia: The Rise Capital* (Sydney: Allen Runwin, 1986); Richard Robinson, ‘Pengembangan Industri dan Perkembangan Ekonomi-Politik Modal: Kasus Indonesia’, dalam Ruth Mc Vey (ed.), *Kaum Kapitalis Asia Tenggara* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998); Sjahrir, *Ekonomi Enak Dibaca dan Perlu* (Jakarta: Grafiti, 1994); Christianto Wibisono, *Menelusuri Akar Krisis Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1999); Center for Financial Policy Studies, *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Suatu Pelajaran yang Sangat Mahal Bagi Otoritas Moneter dan Perbankan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).

³²Jati, *op. cit.*, hlm. 116. Lihat juga: Afthonul Afif, *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia* (Depok: Kepik, 2012), hlm. 138.

ditangkap oleh pihak militer, serta dibunuh oleh massa dengan beralih anti Komunisme.³³ Pemerintah pada masa Orde Baru mengeluarkan berbagai peraturan yang bersifat diskriminatif, salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Intinya berupa pembatasan pelaksanaan segala hal yang bertautan dengan budaya dan kepercayaan keturunan Tionghoa dimuka umum. Kebijakan pemerintah ini dibuat dengan pertimbangan bahwa agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa di Indonesia dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moril yang kurang wajar bagi warga negara Indonesia lainnya.³⁴

Pemerintah Orde Baru juga menegaskan kepada keturunan Tionghoa agar berbaur atau berasimilasi dengan penduduk asli Indonesia. Asimilasi terhadap keturunan Tionghoa berdampak pada kebudayaan mereka yang tidak diperbolehkan untuk dipertunjukkan kepada masyarakat umum, namun hanya ditampilkan hanya pada lingkungan intern keluarga dan tidak diperbolehkan ditampilkan secara meriah di depan umum, karena pemerintah beranggapan bahwa jika keturunan Tionghoa masih mempertunjukkan kebudayaan mereka didepan umum maka hal itu dapat menghambat proses asimilasi.³⁵ Akan tetapi masyarakat keturunan Tionghoa berusaha mematuhi peraturan tersebut dan

³³*Ibid.*, Lihat juga: Parsudi Suparlan, *Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), hlm. 30.

³⁴H. Junus Jahja, 'Masalah Orang Tionghoa di Indonesia', dalam Hamzah, *op.cit.*, hlm. 87.

³⁵*Ibid.*,

melaksanakan sembahyang, ritual keagamaan, serta mempertunjukkan kesenian Tionghoa di lingkungan intern atau keluarga saja.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru memberikan kesempatan kepada keturunan Tionghoa untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan Indonesia. Akan tetapi, hal ini dirasa oleh keturunan Tionghoa masih ada unsur diskriminasi dan eksploitasi secara tidak langsung yang dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini adalah masa kejayaan para pengusaha, pelaku perekonomian atau para pebisnis keturunan Tionghoa. Akan tetapi apabila dilihat dari sisi lain, mereka berjuang dan memulai bisnisnya ditengah-tengah peraturan yang mengekang mereka.³⁶

Konsep lain yang digunakan dalam tesis ini adalah integrasi. Integrasi yaitu proses sosial yang cenderung kepada harmonisasi dan penyatuan bermacam-macam kesatuan yang berbeda-beda yang terdiri dari individu atau kesatuan sosial yang lebih besar.³⁷ Konsep integrasi mengandung arti persatuan antara etnis Tionghoa dan etnis lainnya di Indonesia tanpa menegaskan kebudayaan masing-masing etnis. Hal ini sesuai dengan motto *Bhinneka Tunggal ika*, berbeda-beda tapi tetap bersatu dalam naungan negara Republik Indonesia. Dalam kenyataan sehari-hari, terlihat bahwa keturunan Tionghoa di Indonesia telah bergaul secara luas dan intensif dengan suku bangsa di Indonesia. Akan tetapi baru terbatas pada

³⁶Shendy A., "Perkembangan Sosio Ekonomi Etnis Cina pada Masa Orde Baru", (*online*), <http://sukmazaman.blogspot.com/2012/01/perkembangan-sosio-ekonomi-etnis-cina-pada-masa-orde-baru.html>, diunduh pada 20 April 2014.

³⁷Burhanuddin, *op. cit.*, hlm. 227.

tingkat penyesuaian perorangan dan belum terjadi integrasi. Orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia telah hidup berabad-abad lamanya, namun mereka belum juga bisa mengintegrasikan kehidupan mereka dengan cara atau kebudayaan Indonesia, sehingga masih terlihat adanya garis pemisah dalam bentuk kehidupan orang-orang keturunan Tionghoa tersebut.³⁸

Perasaan *Chinese Culturalism* menjadi salah satu faktor penghambat integrasi orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia. *Chinese Culturalism* adalah perasaan yang selalu mengagungkan kultur nenek moyang.³⁹ Perasaan yang mengarahkan mereka kepada sikap untuk senantiasa berorientasi kepada budaya leluhur yang mempunyai tradisi berabad-abad lamanya. Contohnya orang-orang keturunan Tionghoa mengandalkan integritas suatu hubungan antar orang-orang keturunan Tionghoa di bidang ekonomi dan kekeluargaan, sehingga bentuk usaha atau perusahaan keluarga, sudah menjadi ciri orang-orang keturunan Tionghoa. Fakta itulah yang hendak dihilangkan oleh penguasa Orde Baru dengan cara membaurkan orang-orang keturunan Tionghoa dengan masyarakat pribumi melalui proses pembauran. Pemerintah Orde Baru berharap, orang-orang Tionghoa tidak lagi berorientasi ke negeri leluhurnya, tetapi menjadikan Indonesia benar-benar sebagai tumpah darah mereka.

Konsep asimilasi dalam konteks masalah Tionghoa yaitu etnis Tionghoa diharuskan menghilangkan seluruh identitas ke-Tionghoan-nya untuk kemudian bergabung dengan kebudayaan mayoritas rakyat Indonesia yang dianggap

³⁸Koentjaraningrat, *op. cit.*, hlm. 160.

³⁹Burhanuddin, *op. cit.*, hlm.222.

kebudayaan ‘asli’ Indonesia. Proses peleburan dalam sebuah asimilasi harus diarahkan sampai pada suatu kondisi di mana istilah “minoritas Tionghoa” menjadi tak ada. Untuk mencapai kondisi demikian, perlu asimilasi yang komprehensif sekaligus butuh campur tangan pemerintah. Melalui asimilasi, eksklusivitas menjadi hilang sehingga terbentuk perasaan saling memiliki. Hal tersebut dapat memperkuat ketuhanan dan kesatuan bangsa. Untuk mempercepat pembauran etnis di Indonesia, maka persamaan pandangan, saling belajar, dan saling menghormati antar kelompok etnis sangat diperlukan.

Tesis ini menggunakan istilah Orang Tionghoa, bukan Orang Cina. Istilah Orang Cina dan Orang Tionghoa adalah istilah bahasa Indonesia untuk “orang Tionghoa” sementara Hoakiau adalah istilah bahasa Tionghoa (Hokkien) yang berarti “orang Tionghoa perantauan”.⁴⁰ Istilah Zhongguo (Tionggok) sudah disebut dalam *Liji*, salah satu Kitab Confusius dan mengacu kepada tempat asal orang Tionghoa di zaman Purbakala yaitu di sekitar Sungai Kuning, yang juga merupakan tempat lahirnya peradaban Tionggok. Mereka menganggap negara mereka sebagai pusat dunia, sehingga diberi nama Negara Tengah (Zhong berarti tengah dan guo adalah negara).

Zhongguo atau Tionggok dalam lafal Hokkien baru dipakai untuk nama negara pada akhir abad ke-19 ketika ada reformasi dan kaum revolusioner ingin menumbangkan kekaisaran Qing. Nama itulah yang kemudian dipakai dalam

⁴⁰F. Sleeman, A. A. Utama dan A. Rajendra (Eds.), ‘Berjuang pada Harapan’ dalam Mely G. Tan, *Etnis Cina di Indonesia: Ujian dan Kesengsaraan* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1999), hlm. 683-703.

pembentukan Republik dengan nama *Zhong Hua Min Guo*.⁴¹ Dengan berdirinya Republik pada tahun 1911 yang oleh Kuomintang yang diberi nama: *Zhong Hua Min Guo*, (Hokkian: Tiong Hoa Bin Kok), maka istilah Tiongkok dan Tionghoa menjadi populer. Tionghoa menjadi istilah pengganti untuk Cina di Indonesia, karena terasa lebih bermartabat. Pada masa itu orang Cina sering merasa dihina dengan adanya istilah Cina loleng atau Cina mindering. Di Indonesia, sebelum abad XX mereka biasa disebut sebagai orang Cina (atau *wong Cino*, *tiang Cinten* oleh orang Jawa). Istilah Cina atau Cino dalam bahasa Jawa, masih mengandung makna merendahkan, khususnya di Jawa. Di masa lalu istilah ini menyiratkan penghinaan bagi orang Tionghoa.⁴²

Pada abad XX sebutan ini dianggap mempunyai konotasi kurang baik dan tidak enak didengar, karena sering digunakan untuk memaki-maki atau pada saat marah.⁴³ Penggunaan kata Tionghoa dan Tiongkok menjadi mantap pada tahun 1930-an, dan diangkat sebagai penggunaan yang sopan dan tidak hanya oleh etnis Tionghoa, tetapi juga oleh orang Indonesia pribumi. Pada tahun 1950-an, semua

⁴¹Myra Sidharta, “Sekali lagi, Tionghoa atau Cina”, (*online*), (<http://www.ceritanet.com/16cina.htm> :SEKALI LAGI CINA ATAU TIONGHOA, diunduh pada 4 September 2013).

⁴²Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 81.

⁴³Gondomono, *et al.*, *Pelangi Cina Indonesia* (Jakarta: Intisari, 2002), hlm. 4.

orang yang menggunakan bahasa Indonesia (paling tidak di Jawa) menganggap penggunaan istilah Cina sebagai penghinaan.⁴⁴

E. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber

Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode sejarah (*historical method*), yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁴⁵ Metode sejarah meliputi empat tahap, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi).

Tahap pertama adalah pengumpulan sumber sejarah (heuristik). Sumber yang diteliti berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber-sumber yang dicari dan dikumpulkan adalah sumber-sumber yang relevan dengan tema yang diteliti. Sumber primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini berupa dokumen-dokumen resmi pemerintah, antara lain dokumen tertulis Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat-istiadat Tionghoa merupakan dokumen yang membahas tentang larangan pelaksanaan segala hal yang bertautan dengan budaya dan kepercayaan Tionghoa dimuka umum; Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama Tionghoa; Keputusan Presiden RI No. 6 tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967.

⁴⁴Amir Sidharta, 'Cina, Tionghoa, Chunghua, Suku Hua...', dalam Hamzah, *op.cit.*, hlm. 80.

⁴⁵Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1975), hlm. 32.

Pengumpulan sumber sejarah dilakukan di Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan arsip pribadi milik yayasan kelenteng. Sementara itu berbagai sumber kepustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah para sarjana dan ahli yang relevan, laporan penelitian, artikel-artikel dari jurnal didapatkan dari Perpustakaan Museum Sonobudoyo Yogyakarta, Perpustakaan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, serta Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang. Koran-koran dan majalah diperoleh dari Kantor Depo Arsip Suara Merdeka dan melalui penelusuran dari internet.

Untuk melengkapi data dilakukan pula wawancara terhadap pelaku dan saksi sejarah. Metode ini digunakan karena kesaksian sejarah tidak selamanya tersedia dalam bentuk tertulis. Keterangan dalam sejarah lisan meliputi pengalaman, penglihatan dan kesaksian informan. Seorang informan dapat dikatakan sebagai pelaku sejarah jika informan tersebut mengetahui, memahami, mendengar, melihat atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini dipilih informan yang mengetahui dan memahami peristiwa sejarah yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berasal dari etnis Tionghoa, antara lain Jongkie Tio dan Kwa Tong Hay selaku pemerhati budaya Tionghoa; Liong Hwa Hing dan Amin Cahyono yang merupakan warga keturunan Tionghoa sekaligus pengurus salah satu kelenteng di Pecinan; Ling-Ling selaku pengurus Pasar Semawis; Bambang Sutikno dan Eko Setiya Tjondro Hartono

selaku pengurus salah satu perkumpulan barongsai di Semarang; Yenny Sujana, Tan Thio Ie Eng, dan Lin Chung Niang selaku warga keturunan Tionghoa yang juga pemilik usaha di Pecinan Semarang. Sumber lisan terdiri dari kesaksian pelaku atau saksi mata peristiwa yang terjadi, bukan opini atau pendapat pribadi seseorang. Hal terpenting dalam tahap ini adalah relevansi antara tema dan sumber yang dikumpulkan.

Setelah sumber-sumber yang akan dijadikan sebagai bahan untuk penulisan terkumpulkan maka dilakukan tahap kedua yaitu kritik sumber. Kritik sumber yaitu kegiatan menilai dan menguji sumber-sumber sejarah yang diperlukan, baik kritik terhadap bentuk atau fisik (kritik ekstern) maupun isi sumber (kritik intern). Kritik ekstern bertujuan untuk menilai dan menguji apakah sumber itu secara fisik memang sumber asli yang dibutuhkan. Sementara kritik intern dilakukan setelah kritik ekstern, yaitu setelah diperoleh kepastian bahwa sumber-sumber sejarah yang ditemukan memang benar-benar sumber yang dicari dan diperlukan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang kredibel atau bisa dipercaya. Kritik terhadap sumber-sumber dilakukan dengan cara melakukan koraborasi di antara sumber-sumber tersebut. Proses ini akhirnya menghasilkan informasi yang kredibel dan otentik yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan proses selanjutnya.

Tahap selanjutnya adalah analisis data (interpretasi). Interpretasi yaitu kegiatan mencari saling hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan hubungan kronologis dan sebab akibat dengan melakukan imajinasi, interpretasi dan teorisasi (analisis). Hal ini perlu dilakukan karena seringkali fakta-fakta

sejarah yang diperoleh dari sumber yang telah dikritik belum menunjukkan suatu kebulatan yang bermakna dan baru merupakan kumpulan fakta yang tidak saling berhubungan. Interpretasi juga menyangkut proses seleksi sejarah, artinya tidak semua fakta-fakta sejarah itu bisa dimasukkan atau dipergunakan, dan ini sangat tergantung kepada anggapan masing-masing sejarawan, sehingga juga berhubungan dengan masalah subyektivitas sejarah.⁴⁶

Tahap terakhir adalah historiografi (penulisan sejarah) yaitu kegiatan menyajikan, atau menuliskan hasil penelitian menjadi tulisan atau karya sejarah. Kemampuan imajinasi dan seni menulis sangat diperlukan dan menentukan hasil akhir penelitian. Oleh karena itu penulis berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh para pembaca.

F. Sistematika Penulisan

Bab I dibahas tentang latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan pendekatan, metode penelitian dan penggunaan sumber, serta sistematika penulisan.

Bab II dibahas tentang kehidupan komunitas keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967, yang meliputi dinamika politik komunitas keturunan Tionghoa di Semarang, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sosial budaya.

Bab III dibahas tentang Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat-istiadat Tionghoa, yang berisi latar belakang dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967, pelaksanaan Instruksi

⁴⁶Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 26.

Presiden No. 14 tahun 1967, dan dampak pelaksanaan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 terhadap kehidupan budaya dan ekonomi keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang yang meliputi dampak budaya, terdiri dari pergantian nama dan penyelenggaraan upacara tradisi keagamaan serta dampak ekonomi.

Bab IV dibahas tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 dan dampaknya terhadap kehidupan budaya dan ekonomi keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang, yang berisi pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, dampak budaya yaitu penguatan aktivitas agama, kepercayaan dan adat istiadat keturunan Tionghoa meliputi perayaan Imlek, *Cap Go Meh* dan Sam Poo, dan kesenian barongsai, serta dampak ekonomi yaitu perkembangan aktivitas ekonomi keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang.

Bab V merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.